

## Mini Riset: Analisis BPJS kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) dengan jumlah kontributor di Sumatera Utara

Oktavia Sukmayati Siregar<sup>1\*</sup>, Ulfa Fadilla Dalimunthe<sup>1</sup>, Sheila Oktaviani Br. Ginting<sup>1</sup>, Fitriani P.Gurning<sup>1</sup>

*1, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

### INFO ARTIKEL

\*Corresponding Author

Email:

oktaviasukmayatiregar@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS PBI akan konsisten dengan jumlah orang yang akan berkontribusi pada negara Sumatera Utara pada tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat 14.936.148 jiwa, 789.834 KK dan 1.273 KK miskin di Sumatera Utara. Sebagian besar rumah tangga termiskin berada di urutan kedelapan belas di Sumatera Utara. Masih ada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi kriteria kartu jaminan kesehatan Indonesia. Namun kontribusi mereka dianggap ditanggung oleh pemerintah atau sumbangan yang diterima. Tetapi ada juga yang tidak berpenghasilan rendah, tetapi mereka yang menerima kontribusi pemerintah. Penggunaan metode pengukuran dengan metode ekspresi adalah metode penelitian. Berdasarkan indikator BPS, angka kemiskinan 18 adalah negara Sumatera Utara, yang berarti ada banyak orang di wilayah ini yang masih memiliki pendapatan. Ini adalah penghalang untuk perawatan kesehatan. Hanya daerah pedesaan yang memiliki banyak bantuan. Dengan 73,47% penerima manfaat IBP pada tahun 2021, seperti Kabupaten Samosir, dan penerima manfaat IBP yang sangat kecil di wilayah Kabupaten Labuanbatu Utara sebesar 19,09% pada tahun 2021. Karena sulitnya memasuki jalan, gubernur utara Labuanbutu akan menerima sedikit bantuan dari PBI. Dia mengatakan bahwa jumlah partisipasi tidak dapat dibandingkan dengan jumlah kontribusi. Pemerintah memperingatkan bahwa garis kemiskinan perlu ditingkatkan. Disarankan agar pemerintah negara bagian Sumatera Utara mengumpulkan kembali data keadaan kemiskinan di masyarakat sehingga pengguna dapat menetapkan target.

**Kata kunci: PBI, Provinsi Sumatera Utara**

### ABSTRACT

The aim of the research is to find out whether PBI BPJS membership is in accordance with the number of contributors in North Sumatra Province in 2021. In 2021, North Sumatra Province has a population of 14,936,148 people, 789,834 headed families, and 1,273 families that are classified as poor. With the largest proportion of poor households, North Sumatra Province is in eighteenth place. There are still low-income people who do not meet the requirements for a Healthy Indonesia Card but whose contributions are borne by the government or are recognized as recipients of contribution assistance, but there are also people who are considered not low-income but who receive contribution assistance from the government. Quantitative study with descriptive methodology is the research technique used. The result was that based on BPS indicators, North Sumatra Province was categorized as number eighteen in poverty at most, this means that there are still many income-earning people living in this region. Lack of access is an obstacle in obtaining health assistance, only urban areas have access to a lot of assistance. For example in Samosir Regency with the most PBI recipients of 73.47% in 2021, and the smallest PBI recipients in the North Labuanbatu Regency area of 19.09% in 2021. Due to difficult road access, North Labuanbatu Regency only received a small amount of PBI assistance. This states that the number of shares is the same as the number of contributions is not proportional. It was suggested to the government that it was necessary to update poverty indicators and it was suggested to the government of Provinsi Sumatera Utara to re-collect data related to the condition of community poverty so that beneficiaries could be right on target.

**Keywords: PBI, Provinsi Sumatera Utara**

## PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memiliki lima program. Ini termasuk asuransi kesehatan, asuransi risiko kerja, asuransi hari tua, asuransi pensiun dan asuransi kematian. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004, BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk mengatur program jaminan sosial di sektor kesehatan, salah satu dari lima program SJSN<sup>1</sup>.

Penerima bantuan iuran (BPI) BPJS, atau penerima bantuan iuran dan pembayaran bulannya dibayarkan oleh pemerintah, merupakan salah satu peserta bpJS. Aturannya, peserta BPJS jenis ini hanya berhak atas seksi 3 dan hanya bisa memilih fasilitas kesehatan di Kelurahan/Kelurahan Boskmasmas atau di kecamatan Puskesmas. Peserta jenis ini juga merupakan peserta yang sebelumnya memiliki jaminan kesehatan umum (Jammemas) dan kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), yang saat ini terjadi dengan peserta pemegang kartu IBP KIS (Kartun Indonesia Sahat)<sup>2</sup>.

Kementerian Sosial adalah badan yang diberdayakan untuk menetapkan standar bagi orang miskin dan membutuhkan setelah berkonsultasi dengan perdana menteri dan / atau organisasi terkait. Ini termasuk Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian akan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempelajari lebih lanjut persyaratan yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian memberikan informasi BPS kepada BPS Kesehatan sebagai tindak lanjut. Selanjutnya, penerima bantuan iuran akan menerima nomor rekening BPJS Kesehatan<sup>3</sup>.

BPS menggunakan gagasan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Tanda-tanda kemiskinan (luas lantai rumah, jenis lantai, jenis dinding). Mereka dapat membeli pakaian dan / atau makan cukup untuk hidup setiap hari, membayar tagihan medis, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gelar sarjana tertentu, dan mendapatkan uang<sup>4</sup>.

Metode ini mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan gizi dasar seseorang dengan mengukur biaya. Akibatnya, orang miskin tinggal di daerah di mana pengeluaran bulanan rata-rata berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan hasil dari garis kemiskinan non pangan (GKM) dan garis kemiskinan pangan (GKM). Orang miskin tinggal di daerah di mana biaya kemiskinan rata-rata 5 orang per bulan<sup>5</sup>.

Pada tahun 2021, terdapat 14.936.148 jiwa, 789.834 KK dan 1.273 KK miskin di Sumatera Utara. Sebagian besar rumah tangga termiskin berada di urutan kedelapan belas di Sumatera Utara. Masih ada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi kriteria kartu jaminan kesehatan Indonesia. Namun kontribusi mereka dianggap ditanggung oleh pemerintah atau sumbangan yang diterima. Tetapi ada juga yang tidak berpenghasilan rendah, tetapi mereka yang menerima kontribusi pemerintah. Dengan kata lain, banyak anggota masyarakat yang menerima donasi tidak berada di jalanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah BPJS PBI akan konsisten dengan jumlah orang yang akan berkontribusi pada negara Sumatera Utara pada tahun 2021.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Penelian kuantitatif dengan data sekunder adalah penelitian dimana peneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain untuk menjawab pertanyaan. Informasi sekunder dari situs web Departemen Kesehatan, BPJS dan sumber lain yang berkontribusi pada penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi. Kelompok umur, jenis kelamin dan tingkat kemiskinan digunakan dalam angka kemiskinan. Mereka berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Menurut komentar yang diperoleh dari situs BPS Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, ditemukan sejumlah kategori sebagai berikut:

#### Umur

Berikut adalah kategori usia penduduk di negara bagian Sumatera Utara, yang dapat didaftarkan ke BPGS Dinas Kesehatan dari 0 hingga 65 tahun ke atas:

**Table 1. Kelompok usia 0 hingga 65 tahun ke atas**

Kelompok Umur	Total populasi kelompok umur dan jenis kelamin (Jiwa)		
	2019	2020	2021
0 - 4	764534	1380042	1375839
5 - 9	791885	1359027	1358070
10 - 14	750454	1331990	1332549
15 - 19	689472	1312750	1307189
20 - 24	634920	1316532	1303578
25 - 29	557015	1259943	1261541
30 - 34	520498	1178971	1186741
35 - 39	490992	1092108	1102840
40 - 44	456938	1007434	1020850
45 - 49	412666	895191	913414
50 - 54	360829	773084	791534
55 - 59	302642	640326	660043
60 - 64	234132	501379	520594
65+	299230	750584	801366
Jumlah	7266207	14799361	14936148

Sumber 1. Data Sekunder, 2021

Menurut Tabel 1, menunjukkan prevalensi 1.375.839 orang berusia 0 hingga 4 tahun, dari setidaknya 60 hingga 64 tahun hingga 520 tahun. 594 penduduk pada tahun 2021.

### Jenis Kelamin

Pria dan wanita dipisahkan ke dalam kategori gender. Distribusi gender di negara Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

**Table 2. Prevalensi Gender**

2019	Laki-Laki			Perempuan		
	2020	2021	2019	2020	2021	
1501845	706122	703973	737311	673920	671866	
1557489	694771	693503	765604	664256	664567	
1464471	686358	685769	714017	645632	646780	
1349988	675684	673437	660516	637066	633752	
1248113	674661	669623	613193	641871	633955	
1108635	642766	644784	551620	617177	616757	
1043661	598218	602566	523163	580753	584175	
994684	550142	555877	503692	541966	546963	
924375	502391	510102	467437	505043	510748	
839993	442064	452053	427327	453127	461361	
742258	376352	386068	381429	396732	405466	
627275	308106	317937	324633	332220	342106	
485545	237809	246957	251413	263570	273637	
674217	326602	350324	374987	423982	451042	

14562549	7422046	7492973	7296342	7377315	7443175
----------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber 2. BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

**Penerima PBI dan Non PBI.**

BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori: penerima bantuan iuran dan penerima bantuan non-iuran, yang melakukan pembayaran iuran bulanan, yang akan memberikan hubungan pendapatan berkelanjutan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Berikut demografi negara Sumatera Utara berdasarkan dispatcher PBI dan Noun PB I:

**Table 3. Penerima PBI Dan Non PBI**

Kabupaten Kota	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Utara					
	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran			BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumatera Utara	27.50	31.10	31.97	22.93	24.95	22.93
Nias	49.92	57.76	56.35	6.54	4.57	9.00
Mandailing Natal	34.89	33.55	32.09	10.21	17.08	12.62
Tapanuli Selatan	28.44	28.24	25.33	9.86	15.98	12.94
Tapanuli Tengah	32.52	40.67	33.70	15.33	15.33	16.53
Tapanuli Utara	32.29	33.77	35.85	19.82	19.11	17.90
Toba Samosir	26.97	29.42	40.46	28.82	24.55	24.11
Labuhan Batu	16.45	23.88	27.41	17.86	20.52	20.43
Asahan	26.66	27.04	30.52	17.37	23.33	18.62
Simalungun	24.05	24.22	24.17	27.86	36.34	27.19
Dairi	28.60	34.00	34.26	19.82	21.55	18.24
Karo	25.17	36.44	30.72	25.59	26.40	26.29
Deli Serdang	18.90	17.42	21.65	27.41	30.10	30.51
Langkat	29.92	41.49	41.37	22.02	16.75	14.82
Nias Selatan	28.89	38.02	29.64	10.05	4.34	3.63
Humbang Hasundutan	29.25	41.91	42.55	15.45	16.36	20.62
Pakpak Bharat	76.63	78.74	73.47	13.72	10.55	13.81
Samosir	34.84	40.14	53.71	20.31	25.50	17.89
Serdang Bedagai	20.73	25.85	29.54	29.89	25.78	21.72
Batu Bara	28.89	34.19	39.59	18.84	18.70	14.91
Padang Lawas Utara	21.13	27.58	26.04	11.36	10.52	15.42
Padang Lawas	24.59	32.72	30.08	17.27	17.12	19.46
Labuhanbatu Selatan	17.35	17.20	19.09	27.98	26.77	25.31
Labuanbatu Utara	23.06	25.15	24.65	15.65	19.64	21.23
Nias Utara	58.61	58.54	61.44	10.35	9.38	4.58
Nias Barat	56.73	66.05	63.66	5.23	8.63	7.85
Sibolga	63.24	71.53	69.24	20.11	17.17	15.80
Tanjungbalai	49.68	52.83	57.03	12.97	12.76	11.61

Pematangsiantar	32.23	30.61	33.73	31.17	36.66	36.65
Tebing Tinggi	39.75	45.45	41.50	25.37	26.32	32.15
Medan	29.60	32.97	32.03	29.85	36.36	32.08
Binjai	24.81	28.15	36.23	35.20	31.11	23.56
Padangsidempuan	20.59	22.99	24.53	25.55	27.87	27.16
Gunungsitoli	52.84	61.93	61.70	23.12	15.43	17.06

Sumber 3.BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan distribusi reseptor PBI dan non-PBI, Kabupaten Samosir sebesar 73,47% dengan reseptor PBI terbanyak pada tahun 2021 dapat dianggap 73,47%, sedangkan di wilayah Kabupaten Labuanbao Utara, reseptor PBI terkecil adalah 19,09% pada tahun 2021.

## PEMBAHASAN

Semua anggota yang ditunjuk memiliki akses ke sumber jaminan sosial Negara, BPJS Kesehatan. Peserta BpJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menerima dan menerima bantuan donasi dari BPJS (dikenal sebagai penerima IBP) (biasanya disebut sebagai reseptor BPJS non-PBI). Badan Pusat Statistik (BPS), yang digunakan untuk menilai kemiskinan, digunakan untuk menentukan kelayakan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Semua anggota yang ditunjuk memiliki akses ke sumber jaminan sosial Negara, BPJS Kesehatan. Keanggotaan dalam BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok: BPJS (PBI) dan peserta BPJS penerima bantuan iuran atau BPJS Non PBI5.

Menurut hasil penelitian, distribusi tanggapan sesuai dengan usia di mana rumah tangga di Sumatera Utara memiliki umumnya 0 hingga 4 tahun. Pada tahun 2021, akan ada 1.375.839 orang berusia 0 hingga 4 tahun dan setidaknya 60 hingga 64 hingga 520 tahun. Pada tahun 2021, angka kelahiran 594 orang di negara Sumatera Utara sangat tinggi.

Kemudian, di Sumatera Utara, mayoritas penduduknya adalah laki-laki - sebaran tanggapan atas pertanyaan berdasarkan hubungan seksual keluarga di negara Sumatera Utara. Pada 2021, hanya ada 7.492.973 pria, sedangkan wanita hanya 7.443.175. Ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang mampu bekerja dan mendapatkan upah lebih produktif. Ini niscaya akan menjadi ukuran besaran upah yang dibebankan kepada keluarga, dan dari situ bisa dianggap layak PBI.

Selain itu, dari sisi reseptor PBI dan non-PBI, distribusi penduduk oleh PBI dan non-PBI dapat dianggap 73,47% pada tahun 2021, sedangkan Kabupaten Samosir sebesar 73,47% pada tahun 2021, sedangkan di wilayah utara Kabupaten Lapuanbatu sebesar 19,09%. Terlihat bahwa tingkat kontribusi masyarakat terhadap Kabupaten Samosir sangat tinggi, dibandingkan dengan non-PBI, dapat dilihat reseptor PBI dalam jumlah yang besar. Di utara Lapuanto Regente, kontribusinya sangat rendah karena hambatan masuk ke wilayah tersebut.

Jika mereka sakit berdasarkan temuan penelitian, mereka menginginkan tempat medis yang tidak harus membayarnya dengan harga terjangkau atau membeli obat-obatan di toko, klinik atau pusat kesehatan.

Banyak orang lebih suka pergi ke Puskesmas karena biayanya lebih murah hanya Rs 10.000 dan mahal di rumah sakit. Menurut BPS, pekerjaan termiskin adalah petani, pekerja pertanian, nelayan, nelayan, pekerja atau pekerjaan di bawah 600.000 rupee Saudi per bulan.

Menurut BPS, orang dengan pendidikan tinggi miskin jika mereka lulus dari sekolah dasar saja. Karena pada saat itu, biaya pendidikan gratis dibandingkan dengan beasiswa negara 9 tahun (program wajib sekolah) dari tahun 6 dari sekolah dasar hingga 3 tahun sekolah menengah. Biaya sekolah diberikan secara gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masyarakat tidak lagi harus membayar biaya sekolah, dan bahkan sekolah telah memperkenalkan buku pinjaman wajib untuk siswa sekolah dasar dan menengah di sekolah umum. Tabungan: Tidak ada minimum Rs 500.000, tidak ada barang yang dapat digunakan sebagai penggunaan utama di mobil, emas, kapal, dll.

## KESIMPULAN

Berdasarkan indikator BPS, angka kemiskinan 18 adalah negara Sumatera Utara, yang berarti ada banyak orang di wilayah ini yang masih memiliki pendapatan. Ini adalah penghalang untuk perawatan kesehatan. Hanya daerah pedesaan yang memiliki banyak bantuan. Dengan 73,47% penerima manfaat IBP pada tahun 2021, seperti Kabupaten Samosir, dan penerima manfaat IBP yang sangat kecil di wilayah

Kabupaten Labuanbato Utara sebesar 19,09% pada tahun 2021. Karena sulitnya memasuki jalan, gubernur utara Labuanbutu akan menerima sedikit bantuan dari PBI. Dia mengatakan bahwa jumlah partisipasi tidak dapat dibandingkan dengan jumlah kontribusi. Pemerintah memperingatkan bahwa garis kemiskinan perlu ditingkatkan. Disarankan agar pemerintah negara bagian Sumatera Utara mengumpulkan kembali data keadaan kemiskinan di masyarakat sehingga pengguna dapat menetapkan target.

## REFERENSI

1. Nurwati. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10(1):245-387.
2. Asyhadi. (2007). *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. . Mataram..
3. Rini, S. (2017). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 1(2):17–33
4. BPJS. (2014). *Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi Yang Sudah Terbit*. . Retrieved from BPJS KESEHATAN.: [www.bpjs.kesehatan.go.id](http://www.bpjs.kesehatan.go.id)
5. Hikmawati. (2015). Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan. . *Jurnal PKS*, Vol. 14, No. 274 , 44-54.
6. Hasil pencarian untuk hasil pencarian Yahoo: <https://sumut.bps.go.id/indicator/12/68/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>. (2023). Diakses 30 Juni 2023 Yahoo.com dari situs web <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID1406G0&p=Source+Url%3A+https%3A%2F%2Fsumut.bps.go.id%2Findicator%2F12%2F68%2F1%2Fjumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
7. Sumber hasil pencarian Yahoo: URL <https://sumut.bps.go.id/indicator/30/478/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-jaminan-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-jaminan-di-provinsi-sumatera-utara.html>. (2023). 30 September 2023 Yahoo.com situs web <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID1406G0&p=Source+Url%3A+https%3A%2F%2Fsumut.bps.go.id%2Findicator%2F30%2F478%2F1%2Fpersentase-penduduk-yang-memiliki-jaminan-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-jaminan-di-provinsi-sumatera-utara.html>